

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.259
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 288.
- Agus Yudha Hernoko (2010), *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta.
- Amalia Nuril Hidayati, “Implementasi Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam”, *Malia*, Vol. 8 No. 2 (Juni, 2017) 241.
- Amiruddin Idris, *Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus: PT. Arun NGL)*, *Jurnal Lentera*, Vol. 13 No. 4, November 2013, hlm. 2
- Cantika Adinda Putri, “Cegah Investor Kakap Kabur, Ini yang dilakukan SKK Migas”, *CNBC Indonesia*, 22 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222175823-4-301274/cegah-investor-kakap-kabur-ini-yang-dilakukan-skk-migas>
- Eduardus Tandelilin (2015), *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta
- Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara melalui Instrumen Kontrak”, *Perspektif*, Vol. XVII No.2 (Mei, 2013) 74-75.
- Fauzi, Akhmad, (2006) *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fuji Rahmadi, “Teori Keadilan Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Januari-Juni 2018) hal 72

- Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 302
- HS Salim (2004), *Hukum Pertambangan di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada [http://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/SCAN\\_BUKU043.pdf](http://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/SCAN_BUKU043.pdf)
- IBR. Supancana, Laporan Tim Analisa dan evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2008).
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “Tujuan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia”, *Mimbar Yustisia*, Vol.2 No.2 (Desember, 2018) 148.
- Kementrian ESDM, “*Gross Split* Lebih Baik untuk Mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2 Februari 2017, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia>.
- M Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- M. Ilham F Putuhena, “Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah onstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (31 Agustus 2015): 237
- Mailinda Eka Yuniza et al., “Natural gas aggregation and the opportunity for synchronization nder Indonesian law,” *The Journal of World Energy Law & Business* 9, no. 5 (6 Oktober 2016): 388–409
- Metta Dharmasaputra, et., al., *Wajah Baru Industri Migas Indonesia –Potret Industri Hulu Minyak dan Gas Nasional di Era Orde Lama, Orde Baru, dan Lanskap Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Katadata Indonesia, 2014) 23.
- Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu*

- Muhammad Fajri, “Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split Terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.1 (2020) 55.
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.2 (Juni, 2016) 285.
- “The Demise of Indonesia’s Upstream Oil and Gas Regulatory Agency: An Alternative Perspective,” *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 1 (30 April 2015): 109–33, <https://doi.org/10.1355/cs37-1e>
- Peter Mahmud Marzuki (2008), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- PUSDATIN ESDM, “Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas” hal.4
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 (Juni, 2016) 193.
- R.H. Wiwoho, (2017). *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta.
- Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta & Henny Juliani, “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5 No. 2 (June, 2022) 136-137.
- Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni. Bandung, 1983. Hlm. 121
- Rapat DPR, “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Migas”, (Juli 11, 2018).
- Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir (Ed.). (2017). *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif.
- Sadono Sukirno (2002). *Makro Ekonomi Modern*, P.T.Rajawali Grafindo Persada: Jakarta. 35

- Salim HS (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada. 346
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun & Krostoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Februari – Juli, 2020) 92.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D (2004), *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta. PT. Media Edukasi.
- Setyadi, Didik S., (2007), *Aspek Hukum Administrasi*. Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Surabaya: Nusantara.
- SKK Migas, “Profil” <https://www.skkmigas.go.id/about-us/profile> (diakses pada 19 Juli 2022 pukul 09.53).
- Soekanto, Soerjono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofia Hidayati, “Kepastian Hukum bagi Investor atas Penggunaan Skema Bagi Hasil (*Gross Split*) di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, *Universitas Trunojoyo Madura*.
- Sudikno Mertokusumo dan a.Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- Sunariyah (2003). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Edisi Keempat. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei, 2014), 219.
- Tengku Erwinsyahbana, “Pelanggaran Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir”, hal. 5-6.
- W.J.S. Poerwadarminta (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka
- Y. Sogar Simamora, (2009) *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh pemerintah*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Youngquist, J. A. (1999) 'Wood-Based Composites and Panel Product Society', in Wood as An Engineering Material. United States of America: Fores.

Zakki Adhlyati & Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls", Vol.2 (2019) hal.414

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambahan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Booklet Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaab Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja SKK Migas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil  
Gross Split.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permen  
ESDM No. 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data  
Migas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PPU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PPU-X/2012.

